

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Koperasi dewasa ini telah diterima secara terbuka oleh negara berkembang maupun negara maju, yang diharapkan dapat menata perekonomian negara tersebut (Ambarwati, 2014). Koperasi merupakan sistem perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan yang berbadan hukum dan dilaksanakan secara bersama-sama sehingga keuntungan serta risiko yang muncul akan diterima bersama-sama pula.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dimana masing-masing bersedia memikul resiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut imbang yang adil menurut publikasi ILO (*International Labour Organization*) yang berjudul “*Co-operative Administration and Management*” 1960 dalam Sudarsono dan Edilius, 1992.

Tabel 1. Perkembangan Koperasi dan KUD Pelita I – Pelita V

No.	Uraian	Satuan	Pelita				
			I	II	III	IV	V
1.	Kop & KUD	Unit	13.523	17.625	24.791	35.512	37.560
2.	Anggota	Orang	2.478.960	7.615.000	8.507.321	15.823.450	19.167.776
3.	Modal	Rp. Jt	38.817	102.197	480.147	583.511	727.943
4.	Volume Usaha	Rp. Jt	88.401	421.981	1.490.112	4.260.190	4.918.474
5.	SHU	Rp. Jt	2.656	9.859	22.000	86.443	120.376

Sumber: Departemen Koperasi, 1992 dalam Baswir, 2013

Koperasi adalah sistem perekonomian Indonesia yang telah diberdayakan sejak Indonesia merdeka (Tabel 1). Pada Tabel 1 terlihat bahwa benar adanya peningkatan jumlah koperasi di Indonesia. Dari Pelita I hingga Pelita V terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 24.037 unit. Peningkatan jumlah koperasi juga sejalan dengan peningkatan anggota, modal, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Eksistensi koperasi yang semakin meningkat pada periode Pelita I hingga Pelita V terjadi karena adanya kebijakan pemerintah berupa pembangunan Pusat-pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) ditingkat pusat dan ibukota provinsi. Pusat Pendidikan Koperasi tersebut sekarang telah diubah menjadi Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian (PUSLATPENKOP) ditingkat pusat dan Balai Latihan Perkoperasian (BALATKOP) di tingkat daerah. Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Instruktur Menteri Koperasi No. 04/Ins/M/VI/1988 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD. Pembinaan dan Pengembangan KUD mandiri diarahkan : (1) menumbuhkan kemampuan perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan, (2) meningkatkan peranannya yang lebih besar dalam perekonomian nasional, (3) memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang adil kepada anggotanya.

Perkembangan jumlah koperasi di Indonesia yang semakin meningkat juga dialami setiap provinsi di Indonesia (Lampiran 1), akan tetapi berbeda bagi Provinsi Jambi. Memasuki tahun 2012 hingga 2015 Provinsi Jambi mengalami penurunan jumlah koperasi sebanyak 172 unit. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya kegiatan usaha koperasi dan semakin jarangya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi sehingga dilakukannya pembubaran koperasi (Wahyuning, 2013).

Dilihat dari keadaan koperasi (jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan Sisa Hasil Usaha) di Provinsi Jambi (Lampiran 2). Terlihat bahwa keadaan koperasi di Kabupaten Muaro Jambi kurang baik. Kabupaten Muaro Jambi memperoleh persentase jumlah koperasi kedua tertinggi setelah Kota Jambi sebesar 12,49%, tetapi hanya memiliki nilai SHU dan volume usaha sebesar 2,94% dan 0,53%, sedangkan Kabupaten Tanjab Barat yang hanya memiliki koperasi sebanyak 112 unit atau sebesar 4,94% dari total koperasi yang ada di Provinsi Jambi dapat memperoleh persentase volume usaha tertinggi dan SHU kedua tertinggi di Provinsi Jambi, yakni sebesar 77,67% dan 22,44% setelah Kabupaten Merangin sebesar 27,72%. Dengan kata lain perbandingan nilai SHU yang diperoleh Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjab Barat adalah 1:7.

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Muaro Jambi disetiap tahunnya terus meningkat (Lampiran 3), akan tetapi besarnya nilai SHU masih sulit meningkat untuk sejalan dengan jumlah koperasi yang ada. Rendahnya nilai SHU tersebut, dikarenakan: (1) kurangnya partisipasi anggota dalam membayarkan simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela yang merupakan modal sendiri (Patcha, 2005 dalam Wahyuning, 2013). Modal berpengaruh pada SHU

dikarenakan rendahnya modal untuk melakukan kegiatan usaha koperasi maka akan rendah pula nilai penerimaan bagi koperasi yang berujung pada rendahnya nilai SHU (Wahyuning, 2013), (2) dan kurangnya kegiatan ekonomi usaha koperasi sehingga menurunkan nilai volume usaha (Atmadji, 2007 dalam Wahyuning, 2013). Volume usaha yang rendah tentu memberikan nilai penerimaan yang rendah pula pada koperasi yang berujung pada rendahnya nilai SHU (Wahyuning, 2013).

Koperasi Kabupaten Muaro Jambi didominasi oleh Koperasi Perkebunan (Lampiran 4). Persentase jumlah Koperasi Perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 28,14% pada tahun 2015 dari total jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah Koperasi Perkebunan yang mendominasi tentu didukung oleh jumlah mata pencarian masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang paling dominan berada di sektor pertanian, yaitu sebesar 55,97% (Lampiran 5). Sektor pertanian yang menonjol di Kabupaten Muaro Jambi sendiri ada di bidang Perkebunan Kelapa Sawit (Lampiran 6). Luas tanaman Kelapa Sawit yang mendominasi Sektor Pertanian di kabupaten Muaro Jambi sebesar 69,16% dari luas areal yang dimiliki Kabupaten Muaro Jambi untuk bidang perkebunan.

Kecamatan Sungai Bahar adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Sungai Bahar memiliki jumlah koperasi yang memadai (Tabel 2). Jumlah koperasi di Kecamatan Sungai Bahar tentu didominasi oleh Koperasi Perkebunan dikarenakan mata pencarian masyarakat Kecamatan Sungai Bahar 85% adalah petani kelapa sawit (Lampiran 7). Dimana koperasi dibentuk sesuai akan kebutuhan anggota (Bachrudin, 2010). Jumlah Koperasi Perkebunan di Kecamatan Sungai Bahar tentu turut mempengaruhi besarnya jumlah Koperasi Perkebunan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 2. Jumlah Koperasi, Anggota, Permodalan dan Sisa Hasil Usaha setiap kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Anggota	Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
1.	Mestong	13	2.207	358.958	583.027	587.020	118.595
2.	Sungai Bahar	24	4.986	1.768.891	2.997.750	7.595.873	516.100
3.	Bahar Selatan	11	4.591	1.477.932	723.143	1.829.003	295.744
4.	Bahar Utara	14	4.948	1.644.133	762.980	1.512.369	211.966
5.	Kumpeh Ulu	11	665	653.570	631.020	776.270	148.710
6.	Sungai Gelam	40	1.933	4.853.356	1.377.326	4.422.956	244.273
7.	Kumpeh	21	2.941	1.172.310	520.965	1.138.705	271.217
8.	Maro Sebo	6	963	379.678	522.849	318.817	88.966
9.	Taman Rajo	9	5.816	470.931	645.811	304.089	63.593
10.	Jambi Luar Kota	32	1.938	1.548.022	335.994	1.385.988	264.264
11.	Sekernan	38	3.069	2.454.258	9.106.400	1.963.680	231.808

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, 2016

Melihat keadaan koperasi yang ada di Kecamatan Sungai Bahar (Tabel 2), Kecamatan Sungai Bahar mampu memperoleh nilai volume usaha terbesar, yaitu 34,79%, akan tetapi nilai SHU Kecamatan Sungai Bahar masih rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Bahar Selatan. Kecamatan Bahar Selatan hanya memiliki nilai volume usaha sebesar 8,37%. Hal tersebut terjadi karena, dari 24 koperasi yang ada di Kecamatan Sungai Bahar hanya 11 unit Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih aktif (Lampiran 8), yaitu KUD Bahar Jaya, KUD Harapan Kita, KUD Setia, KUD Bahari, KUD Bukit Manunggal, KUD Mukti Tama, KUD Makarti Tama, KUD Sri Rejeki, KUD Jujur Lestari, KUD Sumber Makmur, dan KUD Sari Makmur (Ambarwati, 2014).

Menurut Inpres Nomor 2 Tahun 1978, KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (Departemen Perdagangan dan Koperasi, 1992 dalam Situmorang, 2011). KUD juga bergerak dalam sektor pertanian, seperti KUD yang ada di Kecamatan

Sungai Bahar yang mengelola pasca panen kelapa sawit milik anggota untuk dijual ke PTPN VI Nusantara (Persero) yang merupakan mitra dari 11 unit KUD tersebut (Ambarwati, 2014).

Terdapat 11 unit KUD yang masih aktif dan bermitra dengan sebuah perusahaan BUMN di Kecamatan Sungai Bahar. Dari 11 unit KUD ini, KUD Bukit Manunggal adalah satu-satunya KUD yang hanya melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit (Ambarwati, 2014). Untuk KUD selain KUD Bukit Manunggal, melakukan kegiatan usaha ekonomi lain yang dapat menambah nilai volume usaha, seperti simpan pinjam, dan menjual kebutuhan pokok (Ambarwati, 2014), Jika dilihat dari tahun terbentuknya 11 unit KUD tersebut, KUD Bukit Manunggal adalah salah satu KUD tertua (Lampiran 8).

KUD Manunggal berdiri pada tahun 1995 hingga saat ini. KUD Bukit Manunggal tidak mengadakan pemungutan simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela. Hal tersebut hanya dilakukan pada awal pembentukan KUD. Permintaan anggota untuk tidak melakukan kegiatan usaha berbentuk simpan pinjam pada KUD yang membuat tidak dilakukannya pemungutan simpanan tersebut. Anggota hanya menyetujui adanya kegiatan usaha ekonomi pemasaran TBS kelapa sawit pada saat dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT), untuk setiap anggota dikenakan biaya atas jasa KUD dalam memasarkan TBS kelapa sawit sebesar Rp. 2,- Rp/Kg dan kegiatan ekonomi ini masih berlanjut hingga saat ini.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) rutin dilaksanakan oleh anggota KUD Bukit Manunggal. Hal ini yang mendukung KUD Bukit Manunggal menjadi salah satu KUD aktif yang ada di Kecamatan Sungai Bahar. Untuk melihat tingkat kesehatan KUD tidak hanya dilihat dari RAT yang rutin dilaksanakan, melainkan juga dari

kegiatan ekonomi yang dilakukan. Koperasi yang sehat adalah koperasi yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi dan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin (Atmadji, 2007 dalam Wahyuning, 2013). KUD Bukit Manunggal yang berdiri sejak tahun 1995 hingga saat ini hanya memiliki dua kegiatan ekonomi, tetapi hanya pemasaran TBS kelapa sawit yang aktif dan terus berjalan. Melihat usia KUD Bukit Manunggal, seharusnya sudah memiliki minimal empat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian terhadap KUD Bukit Manunggal untuk mengukur kinerja KUD Bukit Manunggal, serta memberikan solusi agar KUD Bukit Manunggal dapat berkembang dan mensejahterakan anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Bidang Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus KUD Bukit Manunggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi)”.

1.2 Perumusan Masalah

Koperasi di Kabupaten Muaro Jambi didominasi oleh Koperasi Perkebunan (Lampiran 4). Koperasi Perkebunan tersebut terbentuk tentu karena didukung oleh mata pencarian masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang menitikberatkan pada sektor pertanian (Lampiran 5). Sektor pertanian yang paling mendominasi adalah perkebunan kelapa sawit, hal tersebut ditandai dengan luas areal tanam kelapa sawit yang lebih luas dibandingkan komoditi lain (Lampiran 6).

Kecamatan Sungai Bahar adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang mata pencarian masyarakatnya 85% petani kelapa sawit (Lampiran 7). Oleh karena itu, Kecamatan Sungai Bahar mempunyai Koperasi Unit Desa (KUD)

yang juga menitikberatkan pada perkebunan kelapa sawit. Jumlah Koperasi Perkebunan yang ada di Kecamatan Sungai Bahar tentu menjadi salah satu penyumbang besarnya jumlah Koperasi Perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi

Terdapat 24 unit Koperasi Unit Desa di Kecamatan Sungai Bahar (Tabel 2), diantara 24 unit KUD tersebut hanya 11 unit KUD yang masih aktif dan menjalankan usaha secara rutin (Lampiran 8). KUD yang ada di Kecamatan Sungai Bahar merupakan mitra dari PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) (Ambarwati, 2014). Diantara 11 unit KUD aktif yang ada di Kecamatan Sungai Bahar, hanya KUD Bukit Manunggal yang melakukan satu kegiatan usaha ekonomi, yaitu di Perkebunan Kelapa Sawit dimana untuk proses pengelolaan pasca panen kelapa sawit, petani yang tergabung dalam koperasi memanfaatkan lembaga ini untuk menjual hasil panennya.

Koperasi yang sehat ditandai dengan berbagai macam kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan dan rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Atmadji, 2007 dalam Wahyuning, 2013). KUD Bukit Manunggal merupakan salah satu dari sebelas KUD yang masih aktif sampai saat ini di Kecamatan Sungai Bahar. KUD Bukit Manunggal sendiri hanya bergerak aktif pada satu kegiatan usaha ekonomi, yaitu penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Dalam melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), KUD Bukit Manunggal tetap rutin melaksanakannya. Dilihat dari usia KUD Bukit Manunggal, seharusnya KUD sudah memiliki minimal empat kegiatan ekonomi yang aktif dan terus bergerak. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian agar dapat melihat kinerja KUD tersebut.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran KUD Bukit Manunggal sebagai koperasi perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Manunggal di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi terhadap kesejahteraan anggota?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran KUD Bukit Manunggal sebagai koperasi perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Manunggal di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi terhadap kesejahteraan anggota.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal dari KUD di Kecamatan Sungai Bahar berkaitan dengan masalah kinerja koperasi.
3. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa yang berkaitan dengan evaluasi kinerja koperasi.